



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REVIU RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 disusun sebagai tahun kedua dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024, secara umum Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 disamping dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

Semoga Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang.

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



HERU WISNU WIBOWO

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650710 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
2. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	2
2.1 PELAKSANAAN RENSTRA BIDANG PERKERETAAPIAN 2020-2024	2
2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN PERKERETAAPIAN	4
2.3 TUJUAN DAN SASARAN	6
3. RENCANA KINERJA TAHUN 2021	7
3.1 TARGET KINERJA 2020-2024	7
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021	7
4. PENUTUP.....	11
LAMPIRAN	

1.PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan No.69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Dengan berpedoman pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024 Bidang Prasarana Perkeretaapian, maka disusun Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 yang merumuskan indikator kinerja tahun 2020 serta sasaran kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2021.

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 memuat tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2020 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2020.

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator – indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 Bidang Prasarana Perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan menjadi salah satu komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah (SAKIP) di setiap unit kerja dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan No.69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1.2 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Rehabilitasi/perawatan prasarana perkeretaapian;
- b. Pembangunan prasarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta api;
- c. Pembinaan, monitoring evaluasi dan pemeriksaan kualitas prasarana perkeretaapian;
- d. Sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian;
- e. Standarisasi material, system, desain di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah 1 yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan

konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I terdiri atas:

a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I;

Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan perawatan, ijin teknis pemanfaatan, penempatan dan/atau penyimpanan peralatan suku cadang, jasa konsultasi dan konstruksi, perhitungan biaya perawatan, pengelolaan data dan pengembangan informasi, pemeriksaan, serta program dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

b. Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I.

Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan, dan stasiun kereta api, pemeriksaan jembatan dan bangunan kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan ijin teknis pemanfaatan, perhitungan biaya perawatan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi, serta program dan dokumentasi di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II
Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan

tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan perawatan, ijin teknis pemanfaatan, penempatan dan/atau penyimpanan peralatan suku cadang, jasa konsultasi dan konstruksi, perhitungan biaya perawatan, pengelolaan data dan pengembangan informasi, pemeriksaan, serta program dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

b. **Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II**

Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan, dan stasiun kereta api, pemeriksaan jembatan dan bangunan kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan ijin teknis pemanfaatan, perhitungan biaya perawatan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi, serta program dan dokumentasi di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

3. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian,

perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Persinyalan;

Seksi Persinyalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengoperasian persinyalan, peralatan suku cadang dan logistik persinyalan, perhitungan dan evaluasi biayapembangunan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang dan logistik persinyalan, pemeriksaan persinyalan, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengesahan kualitas material baru persinyalan, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi persinyalan, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang persinyalan.

b. **Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan.**

Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeriksaan, ijin teknis, pengoperasian, dan pemanfaatan peralatan, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, perhitungan dan evaluasi biaya pembangunan, penyusunan penetapan rancang bangun, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengesahan kualitas material baru, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi, serta program dan dokumentasi di bidang telekomunikasi dan pelistrikan.

4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api,

pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program dan dokumentasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusatenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

- b. Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program dan dokumentasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I;
Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang fasilitas operasi kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program

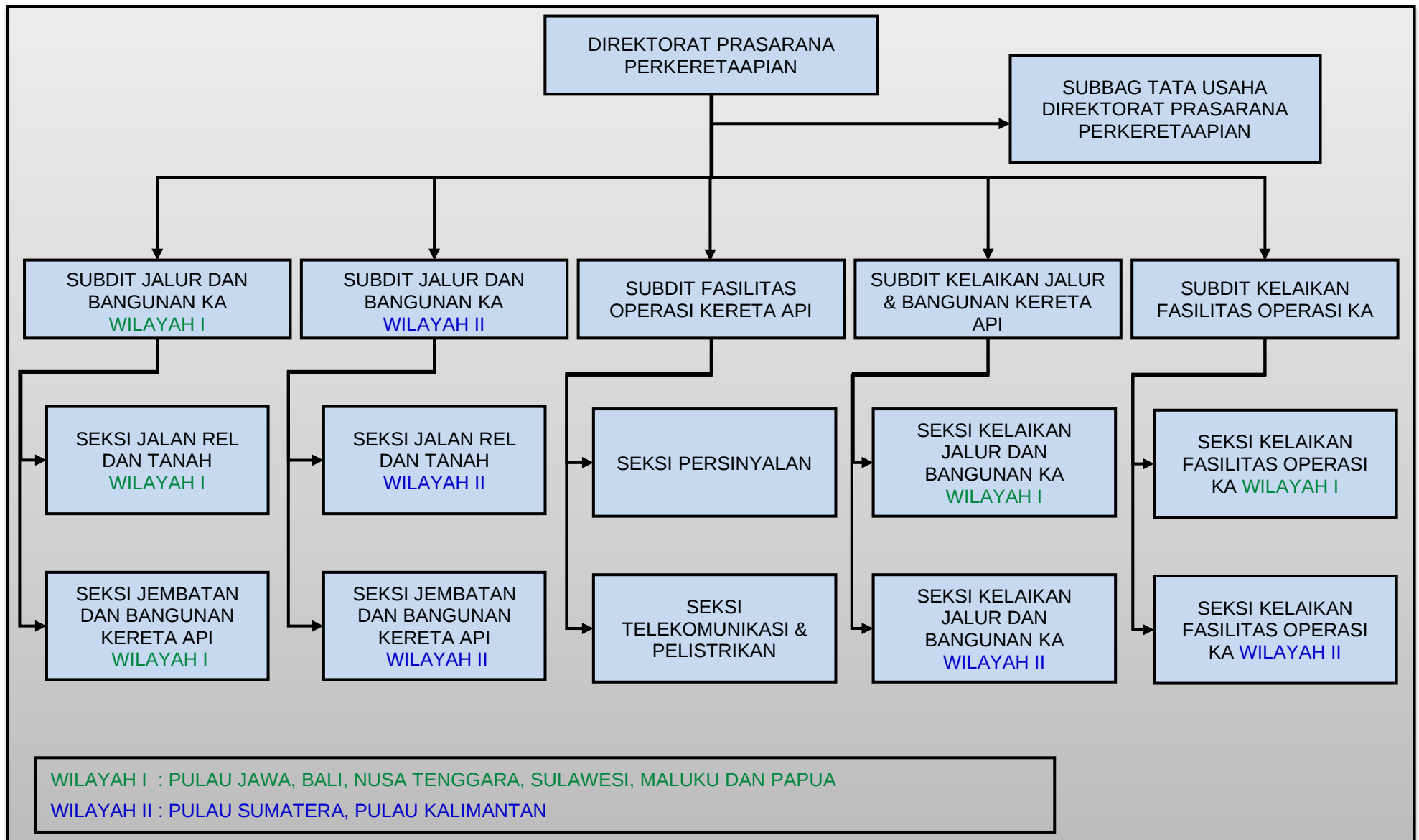
dan dokumentasi kelaikan fasilitas operasi kereta api wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

b. **Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II.**

Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan datadad pengembangan informasi kelaikan di bidang fasilitas operasi kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program dan dokumentasi kelaikan fasilitas operasi kereta api wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

6. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2. DRAFT RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Perkembangan Pembangunan bidang transportasi perkeretaapian akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, dan diharapkan dapat menjadi tulang punggung angkutan darat, maka kebijakan transportasi ke depan akan sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional yang tentu akan terpengaruh oleh kelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Direktorat Prasarana telah Menyusun draft rencana strategis bidang prasarana perkeretaapian periode 2020-2024. Program Utama per sasaran yang akan dilaksanakan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang disusun berdasarkan Cascading Indikator kinerja yang ada saat ini mulai dari Unit Kerja Eselon I s.d Unit Kerja Eselon III Mandiri dan telah ditetapkan melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.006/63/K1/DJKA/19 tanggal 20 Desember 2019 perihal Tindak Lanjut Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan Draft Rancangan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024

2.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus terlaksana dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaan pencapaian strategi Unit Kerja, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menjadi salah satu pelaksana arah kebijakan dan strategi pencapaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Tabel berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
I	Tujuan 1: Meningkatkan konektivitas dan keterpaduan moda transportasi dengan jaringan kereta api		
	Meningkatnya konektivitas jaringan perkeretaapian nasional.	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian nasional.	a. Peningkatan Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi Terhubung Jalur KA b. Pembangunan jalur kereta api baru c. Reaktivasi jalur kereta api non-operasi d. Pelaksanaan Kajian Kebijakan/ Standar/ Pedoman Teknis/ Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jalur Kereta Api e. Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan Kereta Api f. Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang g. Pemenuhan kebutuhan Material Rel dan Wesel untuk mendukung Pembangunan Jalur Kereta Api.
II	Tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian.		
	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Peningkatan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	a. Pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II b. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api termasuk Kereta Api Perkotaan c. Peningkatan Fasilitas Operasi Kereta Api d. Peningkatan Jalur Kereta Api e. Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengukuran TQI
III	Tujuan 3: Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kereta Api.		
	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.	Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian	a. Peningkatan Sertifikasi Kelaikan prasarana perkeretaapian b. Peningkatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kelaikan Jalur, Bangunan dan Fasilitas Operasi KA c. Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelaikan Jalur, Bangunan dan Fasilitas Operasi KA d. Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara e. Pelaksanaan Penyusunan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

NO	TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
IV	Tujuan 4 : Peningkatan terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian		
	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Peningkatan terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	a. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian b. Meningkatnya Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

2.2 TARGET KINERJA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN 2020-2024

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
					2020	2021	2022	2023	2024	
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK P1	Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	35	39	39	49	41	41
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,84	84,97	87,1	89,94	94	94
		IKK P2.2	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	0	0	21	-	-	21
		IKK P2.3	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Unit	0	0	4	-	-	4
SK P3	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	195	60	170	150	200	759
		IKK P3.2	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	150	150	180	200	215	895
		IKK P3.3	Jumlah Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	18	12	12	10	11	63
		IKK P3.4	Persentase Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapain	IKK P4.1	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	1.428.728.000	1.739.440.000	1.913.3884.000	2.104.722.400	2.315.194.640	9.501.469.040
		IKK P4.2	Persentase Penyerapan Anggaran	%	94	100	100	100	100	100

3. CAPAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan kapasitas perketaapian selama tahun 2015 – 2019 telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang Km, peningkatan / rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/ keandalannya sepanjang 1.025,62 Km, pengadaan rel sepanjang 3.690,779 Km'sp, pengadaan wesel sejumlah 685 unit, pembangunan stasiun dan bangunan lain sebanyak 77 unit dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi	Km'sp	89,91	94,82	188,56	370,76	281,56	1.025,62
Peningkatan dan Perawatan/ Rehabilitasi Jalur KA	Km	333,6	39	8,28	228,99	107,7	717,57
Pembangunan Stasiun / Bangunan Operasional Kereta Api	Unit	6	1	5	38	25	77
Penyusunan DED	Dokumen	10	12	5	15	0	57
Penyusunan Studi	Dokumen	10	-	5	14	0	35
Pengadaan Rel	Km'sp	1.193,05	997,229	-	782	718,5	3.690,779
Pengadaan Wesel	Unit	185	-	-	176	324	685

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Target pencapaian sasaran *outcome* program pengelolaan dan pembangunan bidang perkeretaapian ini mencakup indikator-indikator pokok yang mempresentasikan keberhasilan pencapaian fungsi pokok atau tujuan penyelenggaraan perkeretaapian dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024, yakni: peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian, serta peningkatan konektivitas jaringan transportasi perkeretaapian.

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2021

Kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Adapun tugas dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria , pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Sub kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api Tahun 2021 yaitu:

- 1) Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api;
- 2) Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai Dengan TQI;
- 3) Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian
- 4) Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian
- 5) Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
- 6) Jumlah Sertifikat Kelaikan Bidang Prasarana Perkeretaapian;
- 7) Jumlah rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian
- 8) Persentase Penetapan/Persetujuan/Perizinan Dibidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat Waktu;
- 9) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian
- 10) Persentase Penyerapan Anggaran;

Secara lengkap, berikut rincian kegiatan untuk tahun 2021 :

Tabel 3.1
Target Fisik dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian
* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET FISIK & PENDANAAN	
		VOL	BIAYA*
Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	39	3.985.981.962
JUMLAH			3.985.981.962

Tabel 3.2
Target Fisik dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Mendukung Pelayanan Perkeretaapian
* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET FISIK & PENDANAAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI	%	84,97	-
Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	-	432.849.360
Jumlah Peningkatan Gardu Traksi Dan LAA Perkeretaapian	Unit	-	85.450.640
JUMLAH			518.300.000

Tabel 3.3
Target Fisik dan Pendanaan Sasaran KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian
* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET FISIK & PENDANAAN	
		VOL	BIAYA*
Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	180,540	1.439.601.551
Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	205	1.870.171
Jumlah Rumusan Nspk Bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	12	1.073.236
Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan Dibidang Prasarana Perkeretaapian Yang Tepat Waktu	%	100	-
JUMLAH			1.442.544.958

Tabel 3.4
Target Fisik dan Pendanaan Sasaran Terwujudnya GOOD GOVERNANCE Dan CLEAN
GOVERNMENT Di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET FISIK & PENDANAAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Penyerapan Anggaran	%	97,89	40.525.133
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	Rp.	1.739.440.000	0
JUMLAH			40.525.133

5. PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan New Initiatives maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan dibidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2021 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

LAMPIRAN

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2021**

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
JUMLAH PKN/PKW/ SIMPUL TRANSPORTASI YANG TERHUBUNG JALUR KERETA API							
1	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur KA						
	PKN/PKW/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur KA Wilayah I: Jabodebek, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Cirebon, Solo Madiun, Purwokerto, Malang, Tegal, Sukabumi, Rangkasbitung, Serang, Cilegon, Probolinggo, Bandara Soetta, Bandara Adi Soemarmo, Pelabuhan Tj Priok, Pelabuhan Merak, Barro, Kulon Progo, Pelabuhan Tj mas	23					Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I
	PKN/PKW/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur KA Wilayah II: Medan, Padang, Palembang, Lampung, Binjai, Pematang Siantar, Lahat, Baturaja, Prabumulih, Tebing Tinggi, Rantauprapat, Bandara Kualanamu, Bandara BIM, Bandara Sultan Mahmud Baharudin, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Sungai Kertapati	16					Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II
2	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan			2.509.144.727.000	Rupiah	2.509.144.727.000	PPK Pembangunan LRT Sumatera Selatan
3	Konsultan Supervisi Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan			1	Dokumen	5.856.929.000	PPK Pembangunan LRT Sumatera Selatan
4	Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung			1	Sertifikat	2.080.000.000	PPK Pembangunan LRT Sumatera Selatan
5	Pengadaan SHMS untuk LRT Sumatera Selatan	23	Km			26.841.530.000	PPK Pembangunan LRT Sumatera Selatan
JUMLAH		39,00	Lokasi			2.543.923.186.000	
JUMLAH KEGIATAN BIMBINGAN DAN KOORDINASI TEKNIS							
1	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	2	Laporan			383.459.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
2	Bimbingan Teknis, serta Koordinasi Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	2	Laporan			428.903.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
3	Bimbingan Teknis Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	1	Laporan			467.442.000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		5,00	Laporan			1.279.804.000	
JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN RUTIN							
1	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	12	Laporan			1.000.193.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
2	Monitoring dan Evaluasi Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	12	Laporan			441.091.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
3	Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	12	Laporan			393.520.000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		36	Laporan			1.834.804.000	

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
PENGADAAN WESEL							
1	Pengadaan Wesel R 54 untuk Wilayah Sumatera			27	Unit	40.381.622.000	PPK Perawatan
2	Pengadaan Wesel R 54 untuk Wilayah Jawa			47	Unit	68.259.651.000	PPK Perawatan
JUMLAH				74	Unit	108.641.273.000	
	Kegiatan Sewa Lahan	54.795	M2				PPK Perawatan
a	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Jawa Bagian Tengah	10.000	M2			829.150.000	PPK Perawatan
b	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Jawa Bagian Timur	6.195	M2			617.307.000	PPK Perawatan
c	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Medan	20.600	M2			1.391.500.000	PPK Perawatan
d	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Palembang	10.000	M2			537.625.000	PPK Perawatan
e	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Kabupaten Barru	8.000				529.000.000	PPK Perawatan
JUMLAH		54.795	M2			3.904.582.000	
JUMLAH PENGADAAN WESEL dan SEWA LAHAN						112.545.855.000	
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS							
1	DED Pembangunan Jembatan KA Antara Rajapolah-Banjar Lintas Bandung-Kroya Tahap 3	1	Dokumen			2.348.139.000	PPK Fasilitas
2	DED Pembangunan Jalur Ganda KA antara Cicalengka-Karangsari lintas BandungKroya (Tahap 1)	1	Dokumen			1.579.741.000	PPK Fasilitas
3	DED Pembangunan Jalur Ganda KA antara Karangsari-Cipendeuy lintas BandungKroya (Tahap 2)	1	Dokumen			1.676.071.000	PPK Fasilitas
4	DED Pembangunan Jembatan untuk double track di BH 1549 antara Kesugihan-Maos lintas Banjar-Kroya	1	Dokumen			1.351.768.000	PPK Fasilitas
5	DED Pembangunan underpass Bukit Duri JPL 14	1	Dokumen			1.408.311.000	PPK Fasilitas
6	DED Intermoda KA ke Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port	1	Dokumen			1.107.706.000	PPK Fasilitas
7	DED reaktivasi jalur KA Naras Sungai Limau, Sumbar	1	Dokumen			1.256.681.000	PPK Fasilitas
8	DED Pembangunan Jembatan dan Stasiun antara Naras Sungai Limau	1	Dokumen			1.856.765.000	PPK Fasilitas
9	DED Shifting Frekuensi dan Peningkatan Radio Microwave Kereta Api	1	Dokumen			1.416.900.000	PPK Fasilitas
10	DED Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api Lintas Tegal - Pekalongan dan Prupuk -Purwokerto	1	Dokumen			1.434.600.000	PPK Fasilitas
11	DED Penanganan Daerah Rawan Longsor Lintas Lahat-Lubuk Linggau	1	Dokumen			2.312.120.000	PPK Fasilitas

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
JUMLAH		11	Dokumen			17.748.802.000	
PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN DAN STUDI PENDUKUNG LAINNYA DI BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	Jasa Konsultan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek (MYC 2020-2021)	1	Dokumen			155.027.519.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
2	Tunggakan Jasa Konsultan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek			18.563.272.000	Rupiah	18.563.272.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
3	Engineering Services For Jakarta Mass rapid Transit East-West Line Project Phase I (PHLN)	12	Dokumen			89.505.230.000	MRT East West
4	Proyek Manajemen Unit PMU Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	12	Dokumen			35.093.192.000	MRT East West
5	Pemantauan RKL/RPL Pembangunan LRT Sumatera Selatan	1	Dokumen			1.629.350.000	PPK Fasilitas
6	Studi Manajemen Logistik Material Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1	Dokumen			3.338.580.000	PPK Perawatan
7	Pengembangan Aplikasi Perizinan Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain Berbasis Teknologi Informasi	1	Dokumen			1.102.530.000	PPK Fasilitas
8	Pembangunan Aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	1	Dokumen			1.160.280.000	PPK Fasilitas
9	Studi Pemetaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Kelaikan Fasilitas Operasi	1	Dokumen			1.376.265.000	PPK Fasilitas
10	Studi Penyusunan Tata Cara Pengujian Persinyalan Sistem Otomatisasi	1	Dokumen			1.853.293.000	PPK Pembangunan MRT East West, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
JUMLAH		31	Dokumen			308.649.511.000	
PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI							
1	Kondisi Jalur Kereta Api yang sesuai Track Quality Index (TQI) dengan Kecepatan Minimum 80 Km/Jam	84,97	%				PPK IMO, Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
JUMLAH		84,97	%				
JUMLAH PENINGKATAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI PERKERETAAPIAN							
1	Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara-Bogor-dan Manggarai-Jakarta Kota (myc 2020-2022)	-	Unit			421.348.332.000	PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
2	Supervisi Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakartakota (MYC 2020-2022)			-	Dokumen	11.501.028.000	PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
JUMLAH		-	Unit	-	Dokumen	432.849.360.000	
JUMLAH PENINGKATAN GARDU TRAKSI DAN LAA PERKERETAAPIAN							
1	Peningkatan Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakartakota (MYC 2020-2022)	-	Unit			85.450.640.000	PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
JUMLAH		-	Unit			85.450.640.000	
JUMLAH PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (IMO)							

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (IMO)						1.231.119.660.000	PPK IMO
1	Panjang Jalur KA yang Dirawat Oleh PT KAI melalui dana IMO	170,843	Km'sp				PPK IMO
2	Peningkatan Jalur Kereta Api Antara Tanggung - Kedungjati Lintas Semarang - Solo di Wilayah Jawa Tengah (9.436 msp) Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)	9,436	Km'sp			13.783.883.000	PPK IMO
3	Peningkatan Jalur Kereta Api Antara Brumbung - Tanggung Lintas Semarang - Solo di Wilayah Jawa Tengah (10.732 msp) Tahun Anggaran2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			13.647.495.000	Rupiah	13.647.495.000	PPK IMO
4	Supervisi Peningkatan Jalur Kereta Api Di Wilayah Jawa Tengah (20.168 msp) Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			1	Dokumen	1.028.655.000	PPK IMO
5	Pengadaan Bantalan Beton Termasuk Penambat Antara Kedungjati - Gundih Lintas Brumbung - Solo di Wilayah Jawa Tengah			56.444	Unit	37.192.909.000	PPK IMO
6	Pengadaan Bantalan Beton Termasuk Penambat di Wilayah Jawa Bagian Tengah Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			16.847.983.000	Rupiah	16.847.983.000	PPK IMO
7	Pengadaan Bantalan Kayu Termasuk Penambat di Wilayah Jawa Bagian Tengah Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			1.158.082.000	Rupiah	1.158.082.000	PPK IMO
8	Pembongkaran/Rucat Jembatan Eksisting BH.44 KM.19192 lintas Binjai - Besitang			1	Unit	8.284.140.000	PPK IMO
9	Perkuatan Kestabilan Lereng pada Badan Jalan di Wilayah Jawa dan Sumatera	0,261	Km'sp			20.584.323.000	PPK IMO
10	Lanjutan pekerjaan perbaikan kestabilan lereng Mntrg Jembatan BH 355 dan Perawatan jalur KA KM 110 200 s.d KM 11 100 antara Ciganea			11.141.533.000	Rupiah	11.141.533.000	PPK IMO
11	Lanjutan pekerjaan perbaikan kestabilan lereng outlet terowongan lampegan BH 415 KM 73 1 2 antara Crg - Lp lintas Bo-Yk			2.983.773.000	Rupiah	2.983.773.000	PPK IMO
12	Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Jembatan Kereta Api Perangkat Structure Health Monitoring System BH.1290 KM.283745 antara Man			2.262.480.000	Rupiah	2.262.480.000	PPK IMO
13	Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Terowongan Kereta Api Dengan Perangkat Structure Health Monitoring System BH.152A KM.30777 an			1	Unit	4.000.000.000	PPK IMO
15	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 1 Jakarta			1	Dokumen	3.616.050.000	PPK IMO
16	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 2 Bandung			1	Dokumen	2.376.500.000	PPK IMO
17	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 3 Cirebon			1	Dokumen	2.171.120.000	PPK IMO
18	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 4 Semarang			1	Dokumen	2.262.260.000	PPK IMO
19	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 5 Purwokerto			1	Dokumen	2.221.680.000	PPK IMO

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
20	Jasa Konsultasi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 6 Yogyakarta			1	Dokumen	2.222.630.000	PPK IMO
21	Jasa Konsultasi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 7 Madiun			1	Dokumen	2.321.710.000	PPK IMO
22	Jasa Konsultasi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 8 Surabaya			1	Dokumen	2.543.360.000	PPK IMO
23	Jasa Konsultasi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 9 Jember			1	Dokumen	2.542.700.000	PPK IMO
24	Jasa Konsultasi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre I Sumatera Utara			1	Dokumen	2.317.760.000	PPK IMO
25	Jasa Konsultasi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre II Sumatera Barat			1	Dokumen	2.027.040.000	PPK IMO
26	Jasa Konsultasi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre III Sumatera Selatan			1	Dokumen	2.591.650.000	PPK IMO
27	Jasa Konsultasi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre IV Tanjung Karang			1	Dokumen	2.360.750.000	PPK IMO
28	Survei dan Update Data pada Aplikasi MOP5 di Wilayah BTP DKI Jakarta dan Banten Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			1	Dokumen	4.460.449.000	PPK IMO
JUMLAH		180,54	Km'sp			168.950.915.000	
JUMLAH PERAWATAN / REHABILITASI FASILITAS OPERASI KERETA API							
1	Jumlah Fasilitas Operasi KA yang Dirawat Oleh PT KAI	364	Unit				PPK IMO
JUMLAH		364	Unit			-	
JUMLAH PERAWATAN / REHABILITASI JEMBATAN KERETA API							
1	Perawatan Jembatan KA yang Dirawat Oleh PT KAI	345	Unit				PPK IMO
JUMLAH		345	Unit			-	
JUMLAH PERAWATAN / REHABILITASI STASIUN KERETA API							
1	Perawatan Stasiun Milik Pemerintah	16	Stasiun				PPK IMO
JUMLAH		16	Stasiun			-	
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI IM dan IO PT KERETA API INDONESIA							
1	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai IM	345.134.766.133,000	Rupiah				PPK IMO
2	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai IO	348.341.744.548,000	Rupiah				PPK IMO
JUMLAH		693.476.510.681,000	Rupiah				

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
PERAWATAN / REHABILITASI PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API							
1	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 1 Jakarta 70 Titik	70	Titik			8.433.517.000	PPK IMO
2	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 2 Bandung 42 Titik	42	Titik			3.850.128.000	PPK IMO
3	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 3 Cirebon 14 Titik	14	Titik			1.485.201.000	PPK IMO
4	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 4 Semarang 35 Titik	35	Titik			3.001.524.000	PPK IMO
5	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 5 Purwokerto 15 Titik	15	Titik			1.275.538.000	PPK IMO
6	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 6 Yogyakarta 30 Titik	30	Titik			2.755.984.000	PPK IMO
7	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 7 Madiun 28 Titik	28	Titik			2.520.235.000	PPK IMO
8	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 8 Surabaya 37 Titik	37	Titik			4.622.425.000	PPK IMO
9	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 9 Jember 15 Titik	15	Titik			1.574.966.000	PPK IMO
10	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DIVRE I Sumatera Utara 30 Titik	30	Titik			2.526.674.000	PPK IMO
11	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DIVRE II Sumatera Barat 26 Titik	26	Titik			2.059.162.000	PPK IMO
12	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DIVRE III Palembang 30 Titik	30	Titik			3.020.075.000	PPK IMO
13	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DIVRE IV Tanjungkarang 28 Titik	28	Titik			2.405.547.000	PPK IMO
JUMLAH		400	Titik			39.530.976.000	
JUMLAH SERTIFIKAT KELAIKAN PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api	105	Sertifikat			481.627.000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	100	Sertifikat			442.609.000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		205	Sertifikat			924.236.000	
JUMLAH KEGIATAN BIMBINGAN DAN KOORDINASI TEKNIS							
1	Bimbingan Teknis Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	1	Laporan			434.041.000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Bimbingan dan Koordinasi Teknis Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	2	Laporan			511.894.000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
JUMLAH		3	Laporan			945.935.000	
JUMLAH RUMUSAN NSPK BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Jalur dan Bangunan KA beserta Persinyalan	7	Dokumen			652.905.000	
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Subdit 1	1	Dokumen				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Subdit 2	2	Dokumen				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Subdit 3	2	Dokumen				Kasubdit Fasilitas Operasi KA
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Subdit 4	2	Dokumen				Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Organisasi dan Tata Kerja	5	Dokumen			420.331.000	Kasubbag TU
JUMLAH		12	Dokumen			1.073.236.000	
PERSENTASE PENETAPAN / PERSETUJUAN / PERIJINAN DIBIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN YANG TEPAT WAKTU							
1	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain dan ijin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia	100	%				Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II Kasubdit Fasilitas Operasi KA Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
a	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	10	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
b	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	10	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
c	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan / Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan LainSubdit Fasilitas Operasi Kereta Api	11	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Fasilitas Operasi KA
d	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan LainSubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	12	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
e	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	10	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdti Kelaikan Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		100	%			-	
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan & Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.739.440.000	Rp.				Bendahara Penerimaan
JUMLAH		1.739.440.000	Rp.				

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN							
1	Penyerapan Anggaran Satker PPPKA	97,89	%				Kuasa Pengguna Anggaran, PPK Perawatan Kasubbag TU
a	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Fasilitas	99,73	%				PPK Fasilitas
b	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Perawatan	99,21	%				PPK Perawatan
c	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pembangunan LRT Sumsel	99,98	%				PPK LRT Sumatera Selatan
d	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pembangunan LRT Jabodebek	100	%				PPK LRT Jabodebek
e	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek	100	%				PPK Pengadaan LRT Jabodebek
f	Penyerapan Anggaran Kantor PPK IMO	95	%				PPK IMO
g	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pembangunan MRT East West	99	%				PPK MRT East west
h	Penyerapan Anggaran kantor PPK Peningkaran Fasilitas Operasi KA Jabodebek	80	%				PPK Peningkaran FASOP KA Jabodebek
2	Kegiatan Operasional Pengadaan Lahan LRT Jabodebek	1	Laporan			1.500.000.000	PPK Tanah LRT Jabodebek
3	Rapat Evaluasi Hasil Kinerja Satker Prasarana bersama Direktorat	1	Laporan			175.000.000	PPK Perawatan, Kasubbag TU
4	Rakornis Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1	Laporan			759.865.000	PPK Perawatan, Kasubbag TU
5	Layanan Perkantoran : (Kantor LRT Sumsel, Kantor IMO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Subag TU, Kantor LRT Jabodebek, Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodebek)	1	Laporan			19.607.399.000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, PPK MRT East West dan Kasubbag TU
a	Layanan Perkantoran (Kantor LRT Sumsel)					996.327.000	PPK LRT Sumsel
b	Layanan Perkantoran (Kantor IMO)					4.715.364.000	PPK IMO
c	Layanan Perkantoran (Kantor Perawatan)					2.635.723.000	PPK Perawatan
d	Layanan Perkantoran (Kantor Fasilitas)					5.856.491.000	PPK Fasilitas
e	Layanan Perkantoran (Subag TU)					567.341.000	Kasubbag TU
f	Layanan Perkantoran (Kantor LRT Jabodebek)					1.817.203.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
g	Layanan Perkantoran (Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodebek)					355.150.000	PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek
h	Layanan Perkantoran (Kantor MRT East West)					2.663.800.000	PPK MRT East West

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
6	Layanan Internal : a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Kantor LRT Jabodebek, Kantor IMO, Kantor Fasilitas, Kantor Perawatan, Kantor MRT East West dan Subbag Tata Usaha), b. Fasilitas Perkantoran (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek, Kantor IMO, Kantor Fasilitas dan Kantor Perawatan)	1	Laporan			3.223.676.000	PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK MRT East West dan Kasubbag TU
	a Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi						
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Pembangunan LRT Jabodebek)					120.437.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek,
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (IMO)					165.575.000	PPK IMO
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Fasilitas)					300.000.000	PPK Fasilitas
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Perawatan)					250.000.000	PPK Perawatan
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (MRT-East West)					200.000.000	PPK MRT East West
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Subbag Tata Usaha)					850.000.000	Kasubbag TU
	b Fasilitas Perkantoran						
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Pembangunan LRT Jabodebek					83.239.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran IMO					34.425.000	PPK IMO
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Fasilitas					300.000.000	PPK Fasilitas
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Perawatan					20.000.000	PPK Perawatan
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran MRT East West					400.000.000	PPK MRT East West
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Subbag TU					500.000.000	Kasubbag TU
7	Layanan Dukungan Manajemen Satker : a. Administrasi Kegiatan Pelelangan (Kantor IMO, Kantor Fasilitas, Kantor Pembangunan LRT Jabodebek dan Kantor Perawatan), b. Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor LRT Sumsel, Kantor IMO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas dan Kantor Pembangunan LRT Jabodebek), c. Sistem Akuntansi Instansi	2	Laporan/Dokumen			13.727.978.000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, PPK MRT East West dan Kasubbag TU
	a Administrasi Kegiatan Pelelangan					1.852.906.000	
	b Administrasi Kegiatan Lainnya						
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor LRT Sumsel)					1.184.930.000	PPK LRT Sumsel
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor IMO)					2.127.400.000	PPK IMO
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Perawatan)					1.578.471.000	PPK Perawatan

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Fasilitas)					2.195.622.000	PPK Fasilitas
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek)					827.800.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor MRT East West)					3.043.457.000	PPK MRT East West
c	Sistem Akuntansi Instansi					917.392.000	PPK Fasilitas
8	Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Penyusunan, Pelaporan Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021	10	Dokumen			410.383.000	Kasubbag TU
9	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1	Laporan			1.120.832.000	Kasubbag TU
JUMLAH		18	Dokumen/Laporan			40.525.133.000	
Anggaran Tahun 2021 Kegiatan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api						Rp	4.987.352.053.000